

APBN 2015

MELANJUTKAN REFORMASI PEMBANGUNAN BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN



Pemerintah bersama DPR RI telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI

Arah Kebijakan Fiskal

Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

3 Langkah Utama

1. Pengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja.
2. Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan untuk kegiatan produktif.
3. Pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, *debt service ratio*, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta pinjaman yang terukur.

Posisi Strategis APBN 2015

1. Ditetapkan berdasarkan UU No 27 tahun 2014 tentang APBN 2015.
2. Merupakan APBN pertama pelaksanaan RPJMN ketiga (2015-2019)
3. Memiliki posisi yang penting dan unik karena disusun pada tahun transisi pemerintahan
4. Bersifat *baseline budget* yaitu disusun hanya berdasarkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Memberikan ruang gerak pemerintahan hasil Pemilu 2014 untuk melaksanakan program sesuai dengan *platform*, visi dan misi yang direncanakan.
6. Tahun pertama dialokasikannya Dana Desa

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8	Harga Minyak (USD/ Barrel)	105
Inflasi (%)	4,4	Lifting Minyak (Ribuan Barel/ Hari)	900
SPN	6,0	Lifting Gas (Ribuan Barel/ Hari)	1.248
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	11,900		
Nilai Tukar (IDR/USD1)			

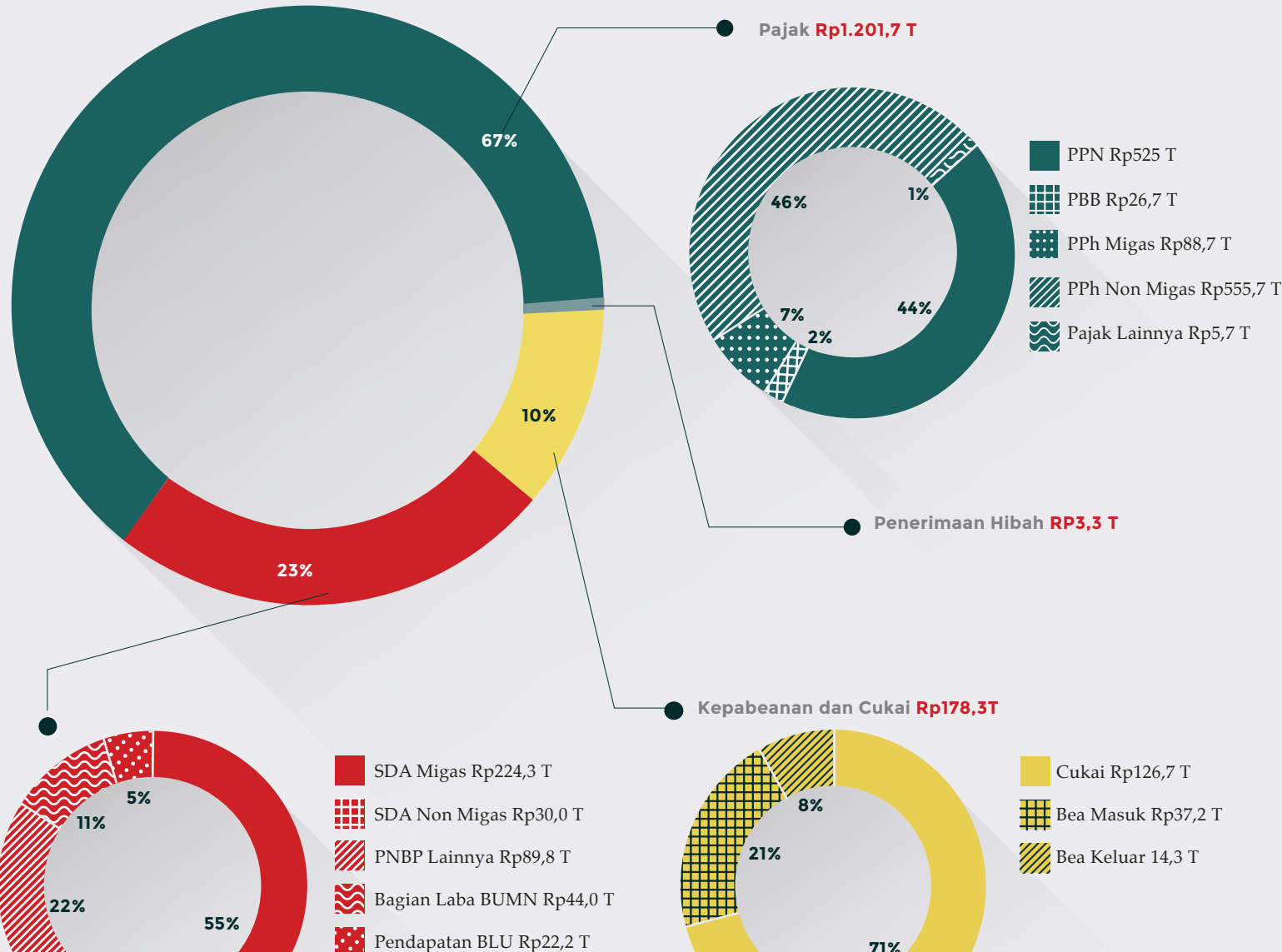
Belanja Negara Rp2.039,5 Triliun

Belanja Kementerian Negara/Lembaga **Rp647,3 T**
Anggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/ Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan.

Dana Desa **Rp9,1 T**
Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Transfer ke Daerah **Rp638,0 T**
Dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Pendapatan Negara Rp1.793,6 Triliun



KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

1. Optimalisasi penerimaan perpajakan dengan mengali potensi wajib pajak orang pribadi golongan pendapatan tinggi dan menengah, serta sektor *non tradable* seperti properti, jasa keuangan, dan perdagangan, serta beberapa transaksi ekonomi strategis.
2. Pemberian insentif fiskal dan penerapan kebijakan hilirisasi

- pada komoditas tertentu untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah.
3. Penyesuaian kebijakan di bidang bea masuk, bea keluar, dan PPh.
 4. Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk pengendalian barang kena cukai.

KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

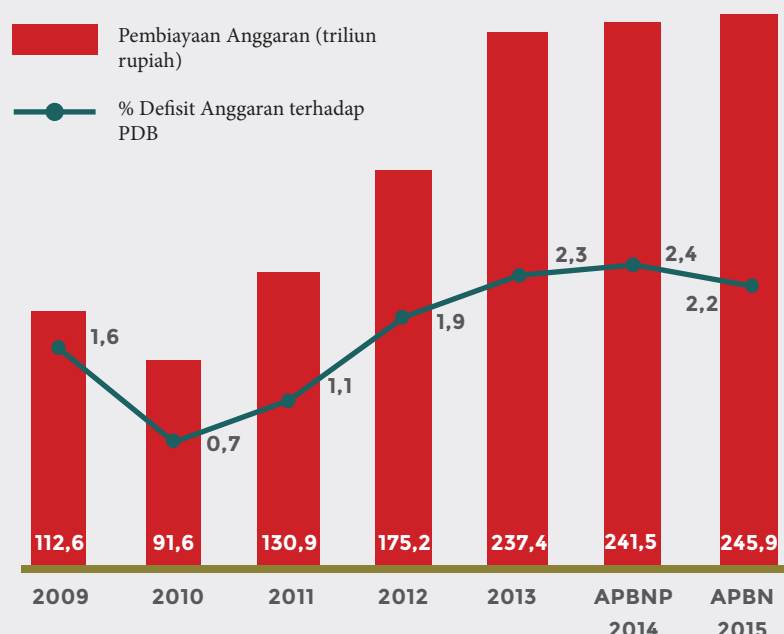
1. Optimalisasi penerimaan migas (menceraiaskan produksi sumur minyak baru, menahan penurunan alamiah *lifting* migas, dan pengendalian *cost recovery*).
2. Penyesuaian tarif PNBP dan ekstensifikasi.
3. Peningkatan kinerja BUMN.
4. Peningkatan pengawasan dan pelaporan PNBP.
5. Perubahan administrasi dan sistem PNBP.
6. Perbaikan regulasi PNBP.

Pembiayaan Anggaran Rp245,9 Triliun

Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan maka pembiayaan anggaran direncanakan sebesar Rp245,9 T. Sumber pembiayaan berasal dari dalam negeri sebesar Rp269,7 T dan luar negeri sebesar negatif Rp23,8T.

Pengeluaran pembiayaan ditujukan terutama guna mendukung pembangunan infrastruktur yaitu:

1. Penyerutan Modal Negara kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Sarana Multigriya Finansial, PT PAL Indonesia, PT Geo Dipa Energi dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
2. Dana Bergilir kepada Lembaga Pengelola Dana Bergilir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Pembiayaan Perumahan; serta
3. Pemberian jaminan Pemerintah



Subsidi **Rp414,7 T**
Pemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

Pembayaran Bunga Utang **Rp152,0 T**
Belanja Pemerintah Pusat atas penggunaan utang dalam dan luar negeri. Dihitung dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk biaya yang timbul terkait pengelolaan utang.

Belanja Lainnya **Rp178,4 T**
Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja Kementerian/ Lembaga, transfer daerah, subsidi, pembayaran bunga utang, dan dana desa.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur Perhubungan: Mendukung Keterhubungan Antar Wilayah

- Pembangunan jalan baru sepanjang 143 km, jembatan baru sepanjang 11.716 m, *flyover/ underpass* sepanjang 1.213,3 m, peningkatan kapasitas jalan sepanjang 2.471,2 km.
- Pembangunan jalur kereta api 265 km, pengadaan 48 lokomotif, KRD, KRL, dan Tram.
- Pembangunan 5 Bandar udara, rehabilitasi 51 bandara, dan implementasi 145 rute perintis;
- Pembangunan 59 prasarana dermaga penyeberangan, pembangunan/ peningkatan kapasitas 26 pelabuhan perintis.

Kementerian Pekerjaan Umum
APBNP 2014: Rp74,5 triliun
APBN 2015: Rp81,3 triliun

Kementerian Perhubungan
APBNP 2014: Rp36,0 triliun
APBN 2015: Rp44,9 triliun

Infrastruktur Energi: Menunjang Ketahanan Energi

- Peningkatan rasio elektrifikasi mencapai 83,18%.
- Instalasi listrik gratis untuk 93.323 RTS nelayan dan rakyat tidak mampu;
- Produksi *lifting* minyak bumi 830-900 MBOEPD dan gas bumi 1.235-1.260 MBOEPD;
- Penambahan jaringan gas pada 2 kota.
- Pembangunan jaringan transmisi 519 KMS (*on going*) dan 76,8 KMS (COD), kapasitas gardu induk 2.680 MVA (*on going*) dan 480 MVA (COD), serta kapasitas gardu distribusi sebesar 147,04 MVA

Kementerian ESDM
APBNP 2014: Rp14,3 triliun
APBN 2015: Rp10,0 triliun

Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

- Pembangunan 120 *town block* rusunawa.

Kementerian Perumahan Rakyat
APBNP 2014: Rp4,0 triliun
APBN 2015: Rp4,6 triliun

Penguatan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas

- Melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), wajib belajar 9 tahun bagi 30,1 juta siswa SD/SDLB/MI/ Ula dan 14,3 juta siswa SMP/SMPLB/MTs/ Wustha;
- Melanjutkan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU), BOS Pendidikan Menengah bagi 106 juta siswa SMA/SMK/MA, pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas yang rusak;
- Beasiswa siswa miskin bagi: 6,9 juta siswa SD/SDLB/MI; 2,9 juta siswa SMP/SMPLB/MTs; 1,3 juta siswa SMA/SMK/MA; dan 194,8 ribu mahasiswa penerima Bidik Misi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
APBNP 2014: Rp76,6 triliun
APBN 2015: Rp88,3 triliun

Kementerian Agama
APBNP 2014: Rp51,6 triliun
APBN 2015: Rp56,4 triliun

Kesehatan Murah untuk Masyarakat

- Melanjutkan program jaminan kesehatan nasional melalui pemberian bantuan iuran kepada masyarakat miskin (Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 86,4 juta jiwa.
- 70 puskesmas di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar meningkat menjadi puskesmas perawatun;
- 61 rumah sakit dan 50 puskesmas terakreditasi;
- 225 kabupaten/ kota mencapai eliminasi malaria;
- 90% anak balita mendapat imunisasi campak dosis kedua;
- 35% desa/ kabupaten melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM);
- 97,5% produk obat memenuhi syarat;
- Meningkatnya persentase produk obat yang memenuhi syarat sebesar 97,5%.

Kementerian Kesehatan
APBNP 2014: Rp47,5 triliun
APBN 2015: Rp47,8 triliun

BPKM
APBNP 2014: Rp4,0 triliun
APBN 2015: Rp4,2 triliun

Kementerian Pertahanan
APBNP 2014: Rp83,5 triliun
APBN 2015: Rp86,9 triliun

Peningkatan kualitas lingkungan hidup

- Penurunan emisi GRK di bidang pertanian, kehutanan, lahan gambut, energi, dan transportasi;
- Mengembangkan upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati: hutan, pertanian, laut dan pesisir, karst (in-situ dan ex-situ) dan pengetahuan tradisional.

Kementerian Kehutanan
APBNP 2014: Rp4,5 triliun
APBN 2015: Rp5,6 triliun

Kementerian Lingkungan Hidup
APBNP 2014: Rp0,9 triliun
APBN 2015: Rp0,8 triliun

Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan: Menurunkan Tingkat Kemiskinan Menjadi 9-10%

- Program penanggulangan kemiskinan, meliputi:
 - **Klaster I:** Bantuan dan Perlindungan Sosial
 - **Klaster II:** Pemberdayaan Masyarakat
 - **Klaster III:** Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro
 - **Klaster IV:** Program Pro Rakyat Melalui Penyediaan Prasarana/ Sarana Murah
- Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan tunai bersyarat untuk sekitar 3 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM);
- Peningkatan kualitas 400 KUMKM melalui klasifikasi dan revitalisasi koperasi.

Kementerian Sosial
APBNP 2014: Rp6,7 triliun
APBN 2015: Rp8,1 triliun

Kementerian Koperasi dan UMKM
APBNP 2014: Rp1,4 triliun
APBN 2015: Rp1,5 triliun

Ketahanan Pangan untuk Stabilisasi Harga dan Memenuhi Kebutuhan Pangan Rakyat

- Peningkatan produksi padi mencapai 73,4 juta ton GKG;
- Pengembangan tanaman tebu 60.000 ha, kopi 4.850 ha, teh 5.050 ha, kakao 20.950 ha, lada 1.650 ha, kapas 3.300 ha, dan karet 19.550 ha;
- Peningkatan produksi perikanan tangkap 6,2 juta ton dan perikanan budidaya 7,3 juta ton;
- Bantuan budidaya padi seluas 350.000 ha, jagung seluas 35.000 ha, serta bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 7.596 unit;
- Perluasan sawah 40.000 ha, dan areal hortikultura/ perkebunan/ peternakan 25.000 ha;
- Pemberdayaan 429 desa mandiri pangan dan 144 kawasan mandiri pangan.

Kementerian Pertanian
APBNP 2014: Rp13,6 triliun
APBN 2015: Rp15,9 triliun

Kementerian Kelautan dan Perikanan
APBNP 2014: Rp5,7 triliun
APBN 2015: Rp6,7 triliun

Peningkatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan

Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

- Pemenuhan rasio polisi terhadap masyarakat sebesar 1 : 582;
- Persentase penambahan ketersediaan alat utama dan alat khusus kepolisian sebesar 4,61%;
- Penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut, keamanan pesisir, dan pelabuhan nasional/ internasional sebesar 11%;
- Peningkatan *clearance rate* tindak pidana di wilayah Kepolisian Daerah sebesar 52%;
- Tercapainya 54.560 komunitas forum kemitraan polisi dan masyarakat yang berpartisipasi aktif pada 50 polres.

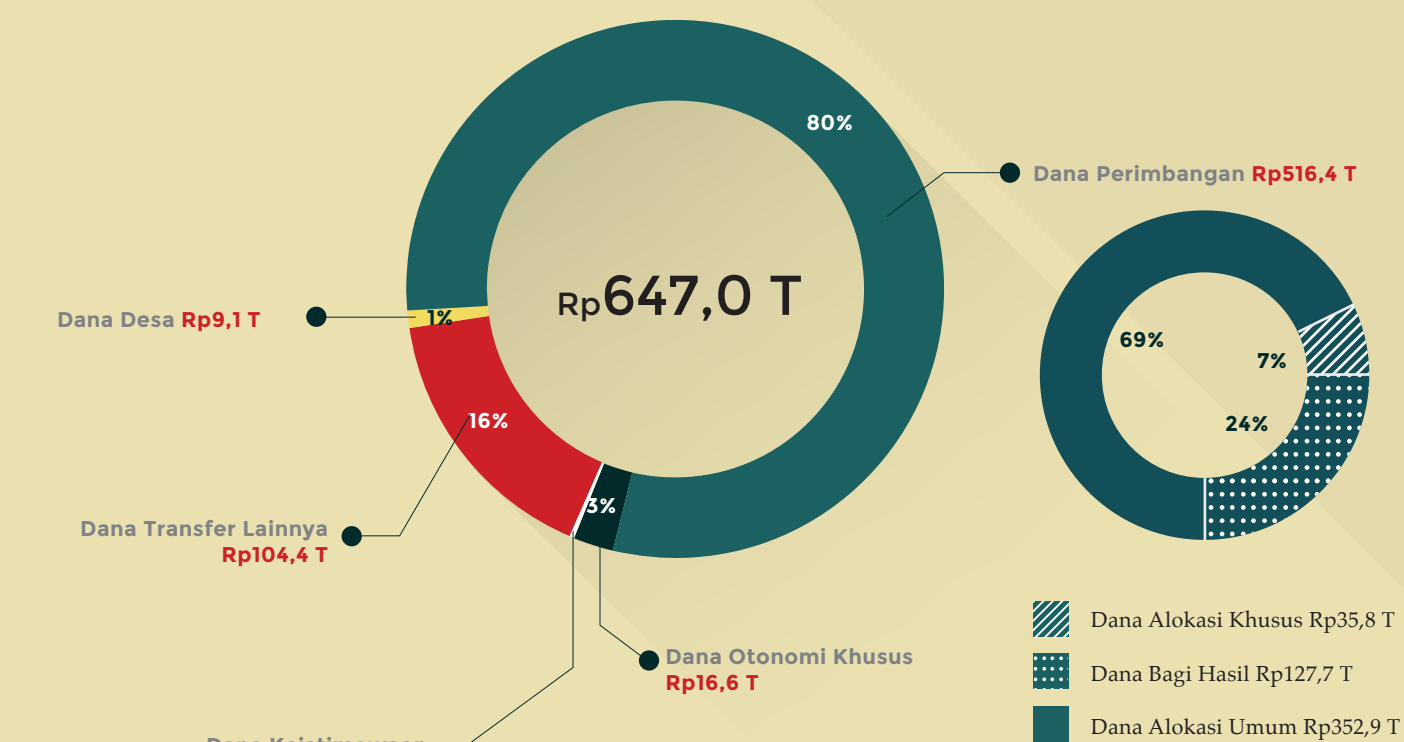
Polri
APBNP 2014: Rp43,6 triliun
APBN 2015: Rp51,6 triliun

Peningkatan Kemampuan Pertahanan dalam Menegakkan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI

- Modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) integratif mencapai 40%, matra darat (21%), matra laut (21%), dan matra udara (17%);
- Memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional, dan mengutamakan pengadaan alutsista hasil produksi industri dalam negeri mencapai 8%.

Kementerian Pertahanan
APBNP 2014: Rp83,5 triliun
APBN 2015: Rp86,9 triliun

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA



KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

- Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana.

- Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar.

- Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi.

- Menetapkan alokasi Dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui realokasi belanja Pemerintah Pusat yang berbasis desa dengan mekanisme transfer kepada kabupaten/ kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

DANA PERIMBANGAN

Mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang mempunyai prinsip satu kesatuan yang tidak terpisahkan (triologi Dana Perimbangan). Daerah yang menerima DBH lebih tinggi akan menerima DAU yang lebih rendah, demikian juga dengan DAK-nya.

Dana Bagi Hasil

Dialokasikan kepada daerah berdasarkan pendapatan APBN guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH tersebut mencakup penyelesaian kurang bayar Rp11,9 T.

Dana Alokasi Umum

Dialokasikan sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah.

Dana Alokasi Khusus

Dialokasikan untuk urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional yang terdiri dari 14 bidang. DAK dialokasikan untuk seluruh daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis (Rp33,0 T).

DANA OTONOMI KHUSUS

Dialokasikan untuk Provinsi Papua Rp4,9 T, Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,1 T, Provinsi Aceh Rp7,0 T. Dana tambahan Otsus Infrastruktur untuk Provinsi Papua Rp2,0 T dan Provinsi Papua Barat Rp0,5 T.

Dana tambahan Otsus Infrastruktur digunakan untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

DANA KEISTIMEWAAN D. I YOGYAKARTA

Sebesar Rp547,5 miliar untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

DANA DESA

Dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyaluran dana desa dilakukan melalui mekanisme transfer dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

DANA TRANSFER LAINYA

Dialokasikan untuk Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (Rp70,3 T untuk guru bersertifikasi dan Rp1,1 T untuk tambahan penghasilan guru PNS Daerah nonsertifikasi).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp31,3 T untuk menstimulasi penyediaan anggaran pendidikan di daerah.

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Rp0,1 T dialokasikan sebagai insentif kepada daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.

Dana Insentif Daerah (DID) Rp1,7 T diberikan kepada daerah berprestasi. DID diberikan agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini WTP/ WDP Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan menetapkan APBD secara tepat waktu.



Kebijakan Subsidi BBM

- Efisiensi anggaran subsidi BBM
- Konversi BBM ke BBG
- Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi (Permen ESDM No 1/2013)
- Subsidi pupuk Rp35,7 T dan subsidi benih Rp0,9 T untuk membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk dan benih dengan harga terjangkau, serta mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan.
- Subsidi *Public Service Obligation* (PSO) Rp3,3 T untuk penunjang angkutan kereta api, penunjang angkutan kapal laut kelas ekonomi, dan informasi publik.
- Subsidi bunga kredit program Rp2,5 T untuk mendukung program pengembangan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, dan program diversifikasi energi.
- Subsidi pajak/ DTP Rp8,7 T untuk mendukung program stabilitas harga kebutuhan pokok dan pengembangan industri strategis.

Kebijakan Subsidi Listrik

- Efisiensi anggaran subsidi listrik melalui *tariff adjustment* untuk golongan pelanggan tertentu.
- Rasio elektrifikasi semakin meningkat.
- Sertifikasi jaringan semakin berkurang.
- Komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik semakin kecil.
- Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) semakin bertambah.

APBN 2015: Baseline budget dan masa transisi

1. Memperhitungkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat
2. Implementasi awal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Belum menampung *new initiatives* yang signifikan sesuai visi misi Presiden yang baru terpilih serta perubahan nomenklatur kementerian/ lembaga

Perubahan-perubahan dalam butir 3 akan ditampung dalam RAPBNP 2015 yang akan disampaikan ke DPR segera.

Informasi lebih lanjut:
Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi
www.kemenkeu.go.id

email:
infoapbn@kemenkeu.go.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia